

Uraian Singkat Belanja Jasa Konsultansi non Konstruksi - Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik - Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bekasi

A. Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup Kegiatan ini terdiri dari ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup substansi.

- A. **Lingkup Wilayah** adalah Kabupaten Bekasi dengan Karakteristik Wilayah Kajian meliputi :
- a. Batas dan luas wilayah kajian;
 - b. Kondisi geografis dan demografis;
 - c. Kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan;
 - d. Kondisi keuangan daerah;
 - e. Populasi penduduk per kecamatan;
 - f. Laju pertumbuhan jumlah penduduk;
 - g. Jumlah masyarakat miskin;
 - h. Potensi sumber daya alam → (hutan, tambang, pertanian, dll yang dilengkapi dengan data luas dan volume);
 - i. Kondisi wilayah kajian (lahan yang subur, lahan yang kritis, dll);
 - j. Luas tutupan lahan (peta tutupan lahan dari Kehutanan);
 - k. Luas tiap kelas topografi;
 - l. Luas tiap kelas kelerengan;
 - m. Jumlah dan luas sungai/waduk/situ;
 - n. Panjang garis pantai;
 - o. Luas areal rawan bencana;
 - p. Jenis, lokasi dan periode kerusakan lingkungan hidup yang pernah terjadi.

- B. **Lingkup Substansi** kegiatan ini adalah Pekerjaan Penyusunan KLHS RPJPD Kabupaten Bekasi Tahun 2025 - 2045 meliputi 23 Kecamatan terdiri dari :

I. PENGADAAN DAN PENGOLAHAN PETA

PETA TAHAP PENGAJIAN KLHS MELIPUTI :

1. Peta Wilayah Kabupaten Bekasi
2. Peta Isu Strategis
3. Peta Penutupan Lahan
4. Peta Topografi
5. Peta Kawasan Rawan Bencana
6. Peta Kawasan Hutan
7. Peta Kawasan Lindung
8. Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Ekosistem
9. Peta Potensi Tambang

10. Peta Lahan Pertanian
11. Peta Kawasan Industri
12. Peta Sebaran Banjir

II. PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Penyusunan Dokumen KLHS RPJPD Tahun 2023-2043 Kabupaten Bekasi dilakukan melalui mekanisme: 1. Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) hasil perumusan isu PB berdasarkan indikator-indikator TPB terhadap kondisi Lingkungan Hidup dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : a. Melaksanakan identifikasi dan perumusan isu Pembangunan Berkelanjutan (PB). Identifikasi dan perumusan isu PB dilakukan untuk menentukan isu yang paling strategis yang diperoleh melalui analisis indikator TPB, menghimpun masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan melalui konsultasi publik. Isu pembangunan paling strategis dirumuskan berdasarkan prioritas dengan mempertimbangkan unsur-unsur paling sedikit:

1. Karakteristik wilayah;
2. Tingkat pentingnya potensi dampak;
3. Keterkaitan antar isu strategis pembangunan berkelanjutan Keterkaitan dengan materi muatan kebijakan, rencana, dan/atau program;
4. Muatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau Hasil KLHS dari KRP pada hirarki di atasnya yang harus diacu, serupa dan berada pada wilayah yang berdekatan, dan/atau memiliki keterkaitan dan/atau relevansi langsung.

Melaksanakan identifikasi isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup, hal ini dilakukan untuk menemukan dan menentukan muatan KRP yang harus dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kondisi Lingkungan Hidup. c. Menganalisis pengaruh hasil identifikasi dampak risiko KRP terhadap lingkungan. Analisis pengaruh dilakukan dengan memperhatikan hubungan keterkaitan materi muatan KRP dengan isu strategis Pembangunan Berkelanjutan hasil konsultasi publik. Analisis pengaruh paling sedikit memuat kajian:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup Kinerja layanan atau jasa ekosistem;

3. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Perumusan alternatif skenario penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dalam pencapaian TPB. Perumusan alternatif penyempurnaan

Kebijakan Rencana, dan/atau Program dijadikan dasar dalam menyusun rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program berupa: a. Perubahan tujuan atau target; b. Perubahan strategi pencapaian target; c. Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi yang lebih memenuhi pertimbangan pembangunan berkelanjutan; d. Perubahan atau penyesuaian proses, metode, dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memenuhi pertimbangan pembangunan berkelanjutan; e. Penundaan, perbaikan urutan, atau perubahan prioritas pelaksanaan; f. Pemberian

arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem; dan/atau g. Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko lingkungan hidup. 3. Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP memuat: a. Materi penyempurnaan KRP; dan/atau b. Informasi jenis usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dan tidak diperbolehkan lagi pelaksanaannya. 1.5.2 RENCANA KERJA Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2025 - 2045 berlangsung selama 5 (lima) bulan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Diskusi pendahuluan
2. Pengumpulan data sekunder
3. Inventarisasi peta pendukung
4. Pengolahan data dan peta Perumusan isu PB berdasarkan indikator TPB Kajian muatan KLHS Perumusan skenario pencapaian TPB
5. Perumusan rekomendasi penyusunan KRP Pelaporan dokumen KLHS RPJPD
6. Pra - Validasi

B. Batasan Pekerjaan

Kegiatan ini dilaksanakan di wilayah administrasi Kabupaten Bekasi. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, studi banding, rapat pembahasan, rapat koordinasi, dan kunjungan lapangan dilakukan dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan dan pelaporan. Uraian dan batasan kegiatan lingkup pekerjaan ini dapat berubah sesuai dengan kesepakatan pada pelaksanaan rapat pembahasan dengan tim teknis.

C. Keluaran Pekerjaan

Keluaran dari hasil pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi non Konstruksi - Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik - Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bekasi yang di dalamnya wajib memuat:

- a) Laporan Pendahuluan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bekasi
- b) Laporan Antara Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bekasi
- c) Laporan Akhir Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bekasi disertai dengan Ringkasan Eksekutif, CD, dan Album Peta